ABSTRAK

Kamal Mubarak , Ahmad Diky, 08210017, 2013, **STUDI TERHADAP BANYAKNYA PERKARA YANG BELUM TERSELESAIKAN SETIAP TAHUN(di Pengadilan Agama Lumajang)**, Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing : Erfaniah Zuhriah, M.H.

Kata Kunci : Penghambat, Penyelesaian Perkara

Dalam Pasal 57 ayat 3 disebutkan bahwa Peradilan dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Untuk itu, segala perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dalam upaya mempertahankan serta meningkatkan mutu dan kualitas dalam memberi pelayanan kepada para pencari keadilan harus memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan, agar semua perkara dapat diselesaikan tepat waktu.

Berdasarkan Laporan Akhir Tahun 2011 Pengadilan Agama Lumajang dari 3456 perkara yang diterimamenyisakan perkara sebanyak 828 perkara atau sebesar 23,96%. Kenyataan ini menjadi kegelisahan akademik bagi peneliti, hingga perlu kiranya dipertanyakan. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Lumajang? Bagaimana solusinya?

Apabila ditinjau dari lokasi penelitian, penelitian ini termasuk dalam penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang dikumpulkan melalui metode wawancara dan dokumentasi. Kemudian diolah dalam empat tahap yaitu *editing, organizing, analyzing, concluding*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebagian besar pencari keadilan di Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang belum siap dengan surat gugatan / permohonan untuk itu pihak Pengadilan Agama membantu membuat dengan sistem komputerisasi, jika salah satu pihak berada / beralamat diluar negeri atau alamat salah satu pihak tidak diketahui maka Pengadilan Agama Lumajang melakukan pemanggilan melalui mass media, dan jika para pihak tidak mengerti tata urutan atau aturan Hukum Acara Pengadilan Agama maka Hakim akan menjelaskan sesederhana mungkin agar mudah dipahami, selain itu perkara PNS, TNI, POLRI, yang ingin bercerai menunggu surat ijin atasan pejabat yang berwenang kurang lebih selama 6 bulan oleh karena itu persidangan ditunda selama 6 bulan. Kurangnya jumlah pegawai pihak Pengadilan Agama Lumajang melakukan rangkap jabatan. Pengadilan Agama Lumajang jumlah pegawai ada 39 orang dengan Hakimnya. Idealnya sebagai Pengadilan Agama kelas IA seharusnya ada 67 orang. Untuk itu Pengadilan Agama Lumajang mengusulkan kepada Mahkamah Agung untuk menambah pegawai agar semua perkara bisa tertangani dengan baik dan tepat waktu.